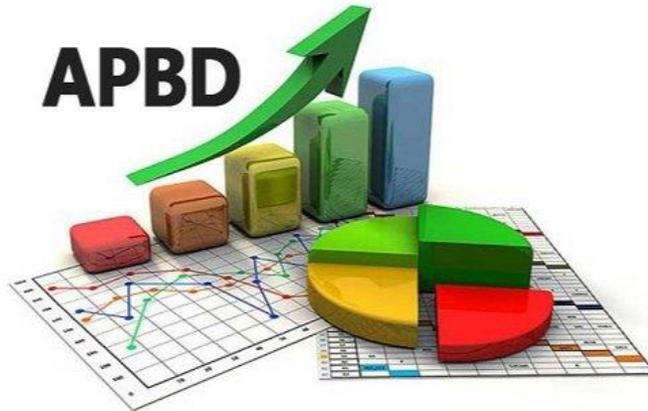


## Ditetapkan Melalui Perkada, APBD TTU Tahun 2020 Rp 1,1 Triliun



*Ilustrasi: <https://klikanggaran.com/>*

**Kefamenanu, Vox NTT-**APBD Induk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2020 beberapa waktu lalu telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penetapan APBD melalui Perkada terpaksa dilakukan lantaran tidak adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD TTU saat sidang APBD Induk tahun 2020 yang digelar November hingga Desember 2019 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah TTU Bonefasius Ola Kian saat diwawancarai wartawan di depan Rumah Jabatan Bupati setempat, Senin (10/02/2020).

Bonefasius menuturkan, sesuai aturan, penetapan APBD menggunakan Perkada total pagu anggarannya tidak boleh melebihi tahun sebelumnya.

Namun begitu untuk Kabupaten TTU, jelasnya, setelah dilakukan kajian penetapan pagu anggaran untuk APBD tahun 2020 nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Untuk APBD tahun 2020, pendapatan sebesar Rp1.156.490.714.873,57.

Sementara untuk pengeluaran, baik itu belanja langsung maupun tak langsung sebesar Rp1.212.396.904.504,42.

Sehingga APBD Induk tahun 2020 dipastikan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 75 Miliar.

“Defisit itu akumulasi dari belanja langsung dan tidak langsung karena memang target pendapatan kita di bawah dari belanja,” ujar Bonefasius.

Ia menuturkan, Perkada yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya dari Inspektorat Daerah (Irda) Provinsi NTT akan melakukan kajian dan evaluasi untuk seterusnya turun ke TTU. Mereka akan turun untuk mengetahui penyebab digunakannya Perkada dalam penetapan APBD Induk tahun 2020.

“Mereka (Irda Provinsi NTT) turun ke sini setelah kita mengirimkan Perkada, kemudian mereka akan kaji dan kemudian mereka akan turun ke sini untuk melakukan penelitian terkait dengan keterlambatan-keterlambatan atau kenapa kita menggunakan Perkada,” tuturnya.

#### **Sumber:**

1. <https://voxnntt.com>. Senin, 10 Februari 2020: Ditetapkan Melalui Perkada APBD TTU Tahun 2020 Rp11 Triliun.
2. <https://timexkupang.com>. Rabu, 12 Februari 2020: APBD TTU 2020 Rp11 Triliun Pemkab Defisit Anggaran Rp75 Miliar.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur perihal penetapan APBD mulai dari proses penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
2. Pasal 105 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
3. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

4. Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) menyatakan Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya; Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
- 1) Kebijakan pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD: dan/atau
  - 2) Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.